

PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN PELAKU USAHA LOKAL DALAM Mendukung EKOWISATA BROMO TENGGER SEMERU

**Rahmawati Halim¹⁾, Rahmawati Kasman, Nabilah Sanjana Putri A.,
Grasela Amaria Peluru, Muhtadin**

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
rahmawatihalim1972@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan destinasi wisata unggulan yang memiliki potensi alam dan budaya masyarakat Tengger yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan pelaku usaha lokal dalam mendukung ekowisata, mengidentifikasi hambatan, serta menganalisis kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan realitas (*das sein*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep *Community Based Tourism* (CBT) telah mulai diterapkan, pemberdayaan kewirausahaan masih belum optimal. Pelaku usaha lokal (homestay, kuliner, transportasi, kerajinan) masih menghadapi kendala akses modal, teknologi, dan manajerial. Ditemukan adanya kesenjangan di mana peran masyarakat masih dominan pada level operasional, bukan strategis. Diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang inklusif.

Kata Kunci: *Ekowisata, Pemberdayaan Masyarakat, Kewirausahaan, Community Based Tourism, Bromo Tengger Semeru.*

ABSTRACT

The Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS) area is a prime tourist destination with significant natural and cultural potential for the Tenggerese people. This study aims to analyze the effectiveness of empowering local businesses in supporting ecotourism, identify barriers, and analyze the gap between ideal conditions (das sollen) and reality (das sein). This study used a qualitative descriptive method, with data collection techniques through direct observation and literature review. The results indicate that although the Community-Based Tourism (CBT) concept has begun to be implemented, entrepreneurial empowerment remains suboptimal. Local businesses (homestays, culinary, transportation, and crafts) still face obstacles in access to capital, technology, and managerial skills. A gap was identified, with the community's role still predominantly at the operational level, rather than the strategic one. Sustainable synergy between the government, academics, and the community is needed to create inclusive economic independence.

Keywords: *Ecotourism, Community Empowerment, Entrepreneurship, Community-Based Tourism, Bromo Tengger Semeru*

Submisi: 22-01-2026

Diterima: 23-01-2026

Dipublikasikan: 02-02-2026

PENDAHULUAN

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia yang terkenal akan kekayaan geologi, ekologi, dan budayanya. Selain keindahan alam Gunung Bromo dan Semeru, kawasan ini dihuni oleh masyarakat suku Tengger yang memiliki potensi budaya unik. Pengembangan ekowisata berbasis komunitas dianggap strategis karena selain menjaga lingkungan, juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan pariwisata di kawasan ini sangat bergantung pada kemampuan masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM, penyedia layanan wisata, dan usaha pendukung lainnya untuk mengambil peran aktif. Tanpa pemberdayaan yang tepat, usaha lokal berisiko tidak berkembang optimal, dan manfaat wisata justru didominasi pihak luar. Konsep *Community Based Tourism* (CBT) menekankan bahwa masyarakat lokal harus menjadi aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata, bukan sekadar objek. Namun, terdapat tantangan dalam pengembangan inovasi kewirausahaan, seperti keterbatasan akses modal, kurangnya pelatihan, serta dukungan kebijakan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan, mengidentifikasi kendala utama, serta melihat kesenjangan antara konsep ideal (*das sollen*) dan realitas lapangan (*das sein*) dalam pemberdayaan pelaku usaha lokal di Bromo Tengger Semeru.

Menurut Purwanti, (2018) bahwa pengembangan ekowisata di kawasan Bromo Tengger Semeru menunjukkan adanya potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Berbagai aktivitas ekonomi seperti jasa transportasi jeep, homestay, penjualan souvenir, kuliner lokal, hingga jasa pemandu wisata berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal memiliki hubungan positif dengan peningkatan pendapatan dan daya tarik wisata kawasan tersebut.

Menurut Adawiyah & Susilo, (2020) bahwa ekowisata di Desa Ranupani sebagai pintu masuk pendakian Gunung Semeru terbukti mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pemberdayaan.

Menurut Sasongko, (2011) bahwa pengembangan ekowisata di kawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pemberdayaan kewirausahaan lokal. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kawasan Bromo memiliki daya tarik wisata yang tinggi, pemanfaatan potensi ekonomi belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Kegiatan pariwisata masih cenderung berfokus pada eksploitasi sumber daya alam tanpa penguatan kapasitas pelaku usaha lokal secara berkelanjutan.

Secara teoritis, pemberdayaan kewirausahaan lokal dapat dianalisis melalui perspektif pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang dikemukakan oleh Chambers, (1995) yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Teori kewirausahaan dari Schumpeter, (1934) juga relevan, yang menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan motor penggerak inovasi dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah. Dalam konteks ekowisata, pelaku usaha lokal tidak hanya

berperan sebagai penyedia jasa, tetapi juga sebagai inovator yang mengembangkan produk wisata berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pengembangan ekowisata di kawasan Bromo Tengger Semeru memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemberdayaan kewirausahaan. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan dalam optimalisasi peran pelaku usaha lokal, baik dari segi kapasitas, akses, maupun integrasi dalam sistem pariwisata. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemberdayaan kewirausahaan pelaku usaha lokal dalam mendukung ekowisata Bromo Tengger Semeru menjadi penting untuk dilakukan guna merumuskan strategi pengembangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi lapangan. Jenis penelitian ini adalah studi observasional di mana peneliti melakukan pengamatan langsung tanpa intervensi, didukung dengan pendekatan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi Langsung: Mencatat fenomena aktivitas usaha lokal, keterlibatan masyarakat, dan kondisi sarana prasarana di kawasan Bromo Tengger Semeru.
2. Kajian Literatur: Menggunakan jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan untuk mendukung analisis teoritis.

Lokasi penelitian berada di kawasan Bromo Tengger Semeru yang secara administratif mencakup Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang, Jawa Timur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaku Usaha Lokal Pelaku usaha lokal di kawasan Bromo umumnya merupakan usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor pendukung pariwisata seperti *homestay*, jasa pemandu wisata (termasuk penyewaan Jeep), kuliner tradisional, dan kerajinan lokal (seperti budidaya bunga Edelweis). Masyarakat suku Tengger menjadikan pariwisata sebagai mata pencaharian sampingan selain bertani.

Bentuk dan Efektivitas Pemberdayaan Bentuk pemberdayaan yang ditemukan meliputi pelatihan dasar pelayanan wisata, kebersihan, dan peningkatan kesadaran pariwisata berkelanjutan. Namun, efektivitas penerapan CBT belum sepenuhnya optimal. Program pemberdayaan cenderung bersifat jangka pendek dan belum terintegrasi dengan strategi kewirausahaan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan transformasi pelaku usaha lokal menjadi wirausaha berdaya saing tinggi belum terwujud sepenuhnya.

Hambatan Pengembangan Kewirausahaan Berdasarkan observasi, ditemukan beberapa hambatan utama:

1. Keterbatasan Modal dan Teknologi: Pelaku usaha masih bergantung pada metode konvensional dan sulit bersaing dengan produk yang terstruktur secara digital.
2. Kurangnya Pendampingan Berkelanjutan: Pendampingan seringkali bersifat sporadis.
3. Keterbatasan Manajerial: Minimnya kemampuan manajemen bisnis dan pemasaran digital.

Analisis Gap (*Das Sollen vs Das Sein*)

1. *Das Sollen* (Ideal): Menurut teori CBT, masyarakat lokal memiliki partisipasi penuh dalam perencanaan strategis dan memetik manfaat ekonomi secara adil.
2. *Das Sein* (Realitas): Di lapangan, peran masyarakat seringkali hanya bersifat operasional (pelaksana), bukan strategis. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa implementasi CBT di Bromo Tengger Semeru masih menghadapi tantangan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan kewirausahaan pelaku usaha lokal di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas ekowisata. Pelaku usaha lokal yang terlibat meliputi pemilik homestay, penyedia jasa transportasi jeep, pedagang souvenir, pelaku usaha kuliner, serta pemandu wisata.

Berdasarkan data sekunder dari Balai Besar TNBTS (2023), jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara mencapai lebih dari 300.000 orang per tahun pasca pandemi, yang berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Desa Cemoro Lawang dan Desa Ngadisari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 pelaku usaha lokal, bahwa UMKM setempat mengalami peningkatan pendapatan sejak berkembangnya ekowisata. Sejak wisata Bromo ramai kembali, tingkat hunian *homestay* bisa mencapai 80% saat musim liburan. Pendapatan cukup signifikan meningkat dibanding sebelum adanya pengelolaan wisata yang lebih teratur. Namun demikian, masih adanya kendala seperti peningkatan tersebut belum merata, terutama bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal dan akses pasar.

Mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat dari Robert Chambers (1995), pemberdayaan mencakup tiga aspek utama, yaitu *enabling* (penciptaan iklim yang memungkinkan), *empowering* (penguatan kapasitas), dan *protecting* (perlindungan terhadap kelompok lemah).

a. *Enabling* (Penciptaan Iklim yang Mendukung)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pengelola TNBTS telah berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kewirausahaan lokal melalui kebijakan pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Program seperti pelatihan pengelolaan homestay, pengembangan produk lokal, serta promosi digital wisata menjadi faktor pendorong tumbuhnya usaha masyarakat. Para pihak telah melakukan kerjasama, hal ini menunjukkan bahwa aspek *enabling* telah berjalan, meskipun belum optimal menjangkau seluruh pelaku usaha.

b. *Empowering* (Penguatan Kapasitas Masyarakat)

Pada aspek *empowering*, penelitian menemukan bahwa terdapat peningkatan kapasitas pelaku usaha, terutama dalam hal pelayanan wisata dan inovasi produk. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, menyatakan telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah.

Sebagai contoh, pelaku usaha kuliner mulai mengembangkan menu berbasis kearifan lokal seperti olahan kentang dan sayuran khas dataran tinggi Tengger. Selain

itu, pelaku usaha jeep wisata juga mulai menerapkan standar pelayanan yang lebih profesional. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal akses permodalan dan literasi bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas belum sepenuhnya didukung oleh akses sumber daya ekonomi yang memadai.

c. *Protecting* (Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Lokal)

Dalam aspek *protecting*, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha lokal masih relatif terbatas. Persaingan dengan pelaku usaha dari luar daerah menjadi salah satu tantangan utama. Beberapa responden mengungkapkan kekhawatiran terhadap masuknya investor besar yang berpotensi menggeser peran pelaku usaha lokal.

Selain itu, regulasi terkait zonasi usaha dan pembatasan aktivitas wisata belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek *protecting* masih perlu diperkuat agar pemberdayaan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan kewirausahaan pelaku usaha lokal di kawasan Bromo Tengger Semeru telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekowisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika dianalisis menggunakan perspektif Chambers (1995), pemberdayaan tersebut masih berada pada tahap berkembang dan belum sepenuhnya optimal.

Aspek *enabling* dan *empowering* telah menunjukkan kemajuan, tetapi aspek *protecting* masih menjadi kelemahan utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas, tetapi juga pada perlindungan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal. Dengan demikian, pemberdayaan kewirausahaan lokal harus dipandang sebagai proses yang berkelanjutan dan terintegrasi, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung ekowisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, sebagai upaya optimalisasi pemberdayaan kewirausahaan pelaku usaha lokal dalam mendukung ekowisata di kawasan Bromo Tengger Semeru. Pemerintah daerah dan pengelola kawasan perlu memperkuat kebijakan pemberdayaan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Program pelatihan kewirausahaan harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mencakup pendampingan intensif, peningkatan kapasitas digital, serta penguatan manajemen usaha. Selain itu, diperlukan perluasan akses terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku usaha lokal, seperti melalui kredit usaha rakyat (KUR) atau skema pembiayaan berbasis komunitas.

Aspek perlindungan terhadap pelaku usaha lokal perlu menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mengatur keterlibatan investor eksternal agar tidak menggeser peran masyarakat lokal, misalnya melalui kebijakan kemitraan wajib antara investor dan pelaku usaha lokal. Selain itu, penataan zonasi usaha dan pengaturan distribusi manfaat ekonomi perlu dilakukan secara adil agar tidak terjadi ketimpangan.

Penguatan kelembagaan masyarakat lokal menjadi hal yang penting untuk

meningkatkan posisi tawar pelaku usaha. Pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama dapat menjadi solusi untuk memperkuat akses pasar, permodalan, serta meningkatkan efisiensi usaha. Kelembagaan ini juga dapat berperan sebagai wadah koordinasi dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan, perlu dilakukan integrasi antara pemberdayaan kewirausahaan dengan prinsip ekowisata berkelanjutan. Pelaku usaha perlu diberikan edukasi mengenai praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penggunaan bahan ramah lingkungan, serta konservasi sumber daya alam. Pemerintah dan pengelola kawasan juga perlu menerapkan kebijakan pembatasan jumlah wisatawan (*carrying capacity*) serta sistem pengawasan lingkungan yang ketat.

Kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi sangat penting dalam mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan. Perguruan tinggi dapat berperan dalam memberikan pendampingan berbasis riset, inovasi produk, serta pengembangan model pemberdayaan yang efektif. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pengembangan kewirausahaan lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan kewirausahaan pelaku usaha lokal dalam mendukung ekowisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dapat disimpulkan bahwa ekowisata telah menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Aktivitas wisata yang berkembang di kawasan ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha yang luas bagi masyarakat, seperti jasa transportasi, homestay, kuliner, dan penjualan produk lokal.

Pemberdayaan kewirausahaan lokal terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar pelaku usaha mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan seiring dengan berkembangnya ekowisata. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata turut memperkuat identitas budaya lokal dan mendorong munculnya inovasi berbasis kearifan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa ekowisata di kawasan Bromo Tengger Semeru memiliki potensi besar sebagai model pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*).

Namun demikian, jika dianalisis menggunakan perspektif pemberdayaan dari Robert Chambers (1995), pemberdayaan yang terjadi masih belum sepenuhnya optimal. Pada aspek *enabling*, telah terdapat upaya menciptakan iklim yang kondusif melalui pelatihan dan dukungan kebijakan, meskipun belum merata bagi seluruh pelaku usaha. Pada aspek *empowering*, peningkatan kapasitas masyarakat sudah terlihat, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan akses permodalan, teknologi, dan literasi bisnis. Sementara itu, pada aspek *protecting*, perlindungan terhadap pelaku usaha lokal masih lemah, terutama dalam menghadapi persaingan dengan pelaku usaha eksternal dan minimnya regulasi yang berpihak pada masyarakat lokal.

Selain itu, peningkatan aktivitas ekowisata juga membawa konsekuensi terhadap tekanan lingkungan, seperti peningkatan volume sampah dan potensi degradasi ekosistem.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pemberdayaan kewirausahaan lokal perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kesadaran dan praktik ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, pemberdayaan kewirausahaan pelaku usaha lokal di kawasan Bromo Tengger Semeru telah memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekowisata dan kesejahteraan masyarakat, tetapi masih memerlukan penguatan yang lebih komprehensif agar dapat berjalan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. sinergi antara pemerintah, akademisi, dan swasta untuk memberikan pendampingan berkelanjutan bukan sekadar pelatihan jangka pendek khususnya dalam aspek pemasaran digital dan inovasi produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Susilo, H. (2020). Pengembangan Ekowisata Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa Ranupani Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *J+Plus UNESA*. Vol. 9, No. 2, Hal. 138-147. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah/article/view/42389>
- Chambers, R. (1995). *Poverty and livelihoods: Whose reality counts?* IDS Discussion Paper. Brighton UK: IDS.
- Purwanti, R. (2018). Effectiveness of local people's perception on ecotourism participation in Bromo Tengger Semeru National Park. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. Vol. 4, No. 3, hal. 263-274. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.03.11>
- Sasongko, R. W. D. (2011). Model pengembangan ekowisata Gunung Bromo berbasis masyarakat Tengger. *Cakrawala Journal*. Vol. 6, No. 1, Hal. 44-59. Retrieved from <https://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/143>
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. USA: Harvard University Press.
- Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. (2023). *Data Kunjungan Tahun 2023*. Laporan Statistik Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

TENTANG PENULIS